

ANTARA 'MULTIKULTURALISME' DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Sebuah Autokritik)

Purwanto, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-Mail: jalamakna@gmail.com

Abstrak

Multikulturalisme adalah disiplin yang rumit dan kontroversial yang mencakup berbagai kebijakan dan praktik. tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritis multikulturalisme dan pendidikan multikultural dalam masyarakat yang secara budaya beragam, liberal, dan demokratis. Penelitian ini adalah jenis penelitian library research dengan menggunakan pisau analisis deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, multikulturalisme dapat dipahami sebagai 'sebuah nilai dan prinsip politik yang bertujuan untuk mempromosikan koeksistensi yang damai dan bermakna antara kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya dengan melindungi warisan budaya dan identitas masyarakat. *Kedua*, ada empat jenis multikulturalisme, yaitu: oposisi (*oppositional*), dominan (*dominant*), liberal (*liberal*), dan 'multikulturalisme mainstream' (*mainstream multiculturalism*). Penulis akan menunjukkan bahwa 'multikulturalisme mainstream' bisa dan semestinya diterapkan. Argumen utamanya bahwa 'multikulturalisme mainstream' tidak mendukung identitas budaya yang terpisah, nasionalisme budaya, atau determinisme budaya seperti yang diklaim oleh banyak pengkritik multikulturalisme.

Kata Kunci: *Multikulturalisme, Pendidikan Multikultural, Oposisi, Dominan, Liberal, Mainstream.*

Abstract

Multiculturalism is a complex and controversial discipline that encompasses a wide range of policies and practices. This paper is intended to explore the theoretical foundations of multiculturalism and multicultural education in a culturally diverse, liberal, and democratic society. This research is a type of library research using a descriptive analytical analysis knife.

The results of this research are: First, multiculturalism can be understood as 'a political value and principle that aims to promote peaceful and meaningful coexistence between culturally different groups by protecting the cultural heritage and identity of society. Second, there are four types of multiculturalism, namely: oppositional, dominant, liberal, and 'mainstream multiculturalism'. The author will show that 'mainstream multiculturalism' can and should be applied. The main argument is that 'mainstream

multiculturalism' does not support separate cultural identities, cultural nationalism, or cultural determinism as many critics of multiculturalism claim.

Keywords: Multiculturalism, Multicultural Education, Oppositional, Dominant, Liberal, Mainstream.

PENDAHULUAN

Meskipun banyak negara saat ini memiliki keragaman budaya, pada tataran teoretis kita masih kekurangan model tentang bagaimana menghadapi "*tantangan multikulturalisme*" (*challenge of multiculturalism*).¹ Sebagai contoh, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar komunitas politik yang tercatat memiliki keragaman budaya, "*most Western political theorists have operated with an idealized model of the polis in which fellow citizens share a common descent, language, and culture*" (sebagian besar ahli teori politik Barat telah beroperasi dengan model polis yang diidealkan di mana sesama warga negara memiliki keturunan, bahasa, dan budaya yang sama).² McCabe juga menyatakan:

"I have no doubt that the capacity to value cultures other than our own is a crucial human advance and, as surely, I want to adopt a relation to my own culture which is not one of simple adulation and

congratulation. However, it is not clear on what basis we can value other cultures nor exactly how we are to adopt this critical attitude to our own culture. The theoretical arguments which are very generally held about the value of other cultures seem deeply flawed." (Penulis tidak meragukan bahwa kemampuan menghargai budaya selain budaya kita sendiri adalah kemajuan manusia yang sangat penting dan, tentunya, penulis ingin mengadopsi hubungan dengan budaya penulis sendiri yang tidak hanya sekadar memuji dan mengucapkan selamat. Namun, tidak jelas atas dasar apa kita dapat menghargai budaya lain atau bagaimana kita harus mengadopsi sikap kritis terhadap budaya kita sendiri. Argumen teoritis

¹ A. Gutmann, (1994). Introduction. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 3.

² W. Kymlicka, (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford, England: Clarendon Press, hal. 2.

yang secara umum dipegang berkaitan dengan nilai budaya lain tampaknya cacat).³

Kurangnya kerangka teori yang komprehensif untuk mendekati keragaman budaya tercermin dalam perjuangan untuk mengakomodasi fenomena tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh semua orang. Sebagian besar dari kita saat ini akan berpendapat bahwa kita memiliki respon positif terhadap keragaman budaya. Namun kita sama sekali tidak setuju satu sama lain mengenai isu-isu praktis seperti apakah anak perempuan Muslim harus diizinkan untuk mengenakan kerudung di sekolah-sekolah umum. Tidak ada jawaban yang sederhana untuk pertanyaan: Haruskah sekolah dalam masyarakat multikultural memperkuat identitas budaya siswa atau tidak? Jika ya, dengan cara apa? Jika tidak, mengapa? Kontroversi mengenai keragaman budaya ini menunjukkan bahwa kita menghadapi tantangan multikulturalisme; tantangan yang menyentuh konsepsi kita mengenai diri sendiri, komunitas, dan pandangan dunia.

Mengingat konteks ini, tidak heran jika pendidikan multikultural menjadi topik kontroversial dalam

literatur pendidikan selama beberapa dekade terakhir. Seperti yang disampaikan oleh Cummins, *"the concept and implementation of multicultural education has been attacked by both sides of the political spectrum"* (konsep dan implementasi pendidikan multikultural diserang oleh kedua sisi spektrum politik).⁴ Ambiguitas konseptual pendidikan multikultural telah diakui sebagai masalah penting era sekarang.

Meninjau literatur tentang pendidikan multikultural di akhir tahun 1980-an, Sleeter dan Grant menyimpulkan:

"Clearly, the term multicultural education means different things to different people. The only common meaning is that it refers to changes in education that are supposed to benefit people of color" (Jelas, istilah pendidikan multikultural memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Satu-satunya makna umum adalah bahwa istilah ini merujuk pada perubahan dalam pendidikan yang

³ C. McCabe, (1986). Broken English. *Critical Quarterly*, 28 (1&2), 3-14, hal. 5-6.

⁴ J. Cummins, (1996b). Foreword, *Affirming diversity: Sociopolitical context of multicultural*

education (pp. xv-xvii). New York: Longman, hal. xv.

seharusnya menguntungkan orang kulit berwarna).⁵

Namun, pengamatan mereka sekali lagi semakin ketinggalan zaman. Pada tahun-tahun belakangan ini, para pendukung pendidikan multikultural telah mengembangkan pandangan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya untuk kepentingan siswa minoritas.⁶

Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan pendidikan multikultural (*multicultural education*), sebuah disiplin yang relatif baru yang terus berkembang dan meluas, adalah sebuah 'konsep payung' (*umbrella concept*) yang luas dan masih dalam proses pengembangan. Karena dimungkinkan mengidentifikasi berbagai pendekatan yang berbeda terhadap pendidikan multikultural,⁷ dapat dikatakan bahwa pendekatan terakhir adalah paling tepat, setidaknya pada saat pembahasan ini sebab pendekatan ini muncul dari pengakuan

bahwa ada batasan-batasan pada pendekatan-pendekatan sebelumnya. Sebagai contoh, pendekatan pendidikan multikultural yang diidentifikasi oleh Sleeter dan Grant adalah:

"*Teaching the Culturally Different*," "*Human Relations*," "*Single Group Studies*," "*Multicultural Education*," and "*Education That Is Multicultural and Social Reconstructionist*." ('Mengajar ragam budaya', 'Hubungan Antarmanusia', 'Studi Kelompok Tunggal', 'Pendidikan Multikultural', dan 'Pendidikan yang Multikultural dan Rekonstruksi Sosial').⁸

Mereka mencatat bahwa pendekatan terakhir adalah yang paling sedikit dikembangkan karena muncul dari kritik terhadap pendekatan Pendidikan Multikultural.⁹ Dengan menyadari perlunya pengembangan,

⁵ C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987). An analysis of multicultural education in the United States. *Harvard Educational Review*, 57 (4), hal. 436.

⁶ J.A. Banks, (1994). *Multiethnic education: Theory and practice*. (Third ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon; S. Nieto, (1996). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education*. (2 ed.). White Plains, NY: Longman.

⁷ M.A. Gibson, (1976). Approaches to multicultural education in the United States: Some concepts and assumptions. *Anthropology*

& *Education Quarterly*, 7(4), 7-18.; R. Pratte, (1983). Multicultural education: Four normative arguments. *Educational Theory*, 33, 21-32; C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987). An analysis of multicultural education in the United States. *Harvard Educational Review*, 57 (4).

⁸ C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987). An analysis of multicultural education in the United States. *Harvard Educational Review*, 57 (4).

⁹ C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987), hal. 436).

kita dapat memusatkan upaya kita pada klarifikasi konseptual (*conceptual clarification*) pada pendekatan tersebut.

Namun, masalah dengan cara konseptualisasi pendidikan multikultural seperti ini adalah bahwa tidak ada alasan yang jelas kenapa semua pendekatan ini harus berada di bawah istilah: "Pendidikan Multikultural" (*multicultural education*). Jika setiap pendekatan pendidikan multikultural mengacu pada kerangka kerja konseptual yang berbeda, maka tidak ada gunanya menyebut semua pendekatan tersebut dengan label yang sama. Cukup masuk akal untuk berasumsi bahwa jika semua pendekatan ini diberi label pendidikan multikultural seharusnya ada kerangka teori umum yang mengikat mereka bersama. Cukup masuk akal juga untuk berasumsi bahwa kerangka teori ini adalah multikulturalisme.

Mungkin akan mengejutkan saat mengetahui bahwa banyak pendukung pendidikan multikultural tidak merujuk pada teori-teori multikulturalisme, meskipun bisa ditunjukkan bahwa teori-teori multikulturalisme belum dikembangkan dengan baik saat ini.

Pluralisme budaya dan bukan multikulturalisme, kerap kali dipandang sebagai landasan teoritis pendidikan multikultural.¹⁰ Namun, sekali lagi, apa arti *cultural pluralism* (pluralisme budaya) sebenarnya masih belum jelas. Untuk membuat situasi menjadi lebih rumit, hubungan antara pendidikan multikultural dan pluralisme budaya juga masih ambigu.¹¹ Beberapa pendukung pendidikan multikultural tidak mau menyebutkan pluralisme budaya. Dalam kondisi kebingungan seperti ini, mungkin terdengar seperti ide yang buruk untuk meneliti hubungan antara 'multikulturalisme' dan 'pendidikan multikultural'.

Pengertian multikulturalisme seringkali cukup ambigu. Penulis berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan implikasi pluralisme budaya/ multikulturalisme terhadap pendidikan multikultural karena hubungan ini yang mengindikasikan apa itu pendidikan multikultural. Penulis pikir kita dapat dengan aman mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menjauh dari prinsip asimilasi (*education that moves away from the principle of assimilation*).

¹⁰ D.M. Gollnick, F.H. Klassen, dan J. Yff, (1976). *Multicultural education and ethnic studies in the United States: An analysis and annotated bibliography of selected ERIC documents*. Washington, D.C.: American Association of Colleges for Teacher Education, ERIC Clearinghouse on Teacher Education; dan B.H.

Suzuki, (1984). Curriculum transformation for multicultural education. *Education and Urban Society*, 16(3), 294-322.

¹¹ S.P. Martin, (1993). The problem of multicultural education: Background, definitions and future agenda. *Multicultural Education Journal*, 11, 9-20.

Meningkatnya legitimasi multikulturalisme (*legitimacy of multiculturalism*) sebagai sebuah nilai—tidak peduli seberapa ambigu definisinya—menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi tradisional telah mencapai batasnya. Banyak statistik menunjukkan bahwa berbagai etnis minoritas tidak terintegrasi ke dalam tatanan sosial "arus utama" (*mainstream*). Sebagai contoh, di Kanada dikatakan bahwa ada 'mosaik vertikal' (*vertical mosaic*), yaitu:

"Anglo -and Euro-Canadians occupying the top political and economic spheres; Ukrainians, Italians, and other European minorities occupying a middle level; French Canadians occupying somewhere in between; and visible minorities, such as blacks, Asians, and native peoples located at the bottom" (Orang Kanada Anglo dan Euro yang menduduki bidang politik dan ekonomi teratas; Ukraina, Italia, dan minoritas Eropa lainnya yang menduduki tingkat

menengah; orang Kanada Perancis yang menduduki suatu tempat di antara keduanya; dan minoritas yang terlihat, seperti orang kulit hitam, Asia, dan penduduk asli yang berada di bagian bawah).¹²

Strategi asimilasi tidak efektif untuk semua orang. Tetapi kejelasan secara relatif berakhir pada poin ini.

Kita masih berjuang untuk mengkonseptualisasikan alternatif-alternatif dari asimilasi, dan ini adalah salah satu alasan utama kenapa kita memiliki kontroversi mengenai pluralisme budaya/multikulturalisme. Menurut penulis, sangat penting untuk memahami teori-teori multikulturalisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Hal ini dikarenakan asumsi-asumsi dasar yang tersirat dalam pembahasan pendidikan multikultural, seperti budaya dan identitas, semakin sering menjadi bahan kajian yang kritis.¹³ Teori-teori multikulturalisme—khususnya yang diajukan oleh Taylor dan Kymlicka, yang disebut *mainstream multiculturalism* (*multikulturalisme*

¹² R.J. Samuda, (1989). Multiculturalism: Perspectives and challenges, *Assessment and placement of minority students* (hal. 5-14). Toronto, Kanada: C.J. Hogrefe, hal. 12.

¹³ M.L. Wax, (1993). How culture misdirects multiculturalism. *Anthropology & Education*

Quarterly, 24(2), 99-115; D.M. Hoffman, (1996). Culture and self in multicultural education: Reflections on discourse, text, and practice. *American Educational Research Journal*, 33(3), 545-569.

dominan)¹⁴—seperti yang akan dibahas, sangat berakar pada isu-isu budaya dan identitas.

Memang, salah satu isu yang mendasari wacana multikulturalisme adalah bahwa pengakuan budaya telah memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dalam masyarakat modern. Seperti yang ditunjukkan oleh Taylor, setelah sistem feodal digantikan oleh demokrasi, yang notabene merupakan perwujudan dari pemikiran pencerahan bahwa individu bersifat otonom, pengakuan atas identitas telah menjadi isu politik yang penting.¹⁵ Dalam konteks ini, permintaan mendapatkan penghormatan yang setara semakin menjadi penting. Kita harus menghormati "potensi membentuk dan mendefinisikan identitas diri sendiri, sebagai individu, dan juga sebagai

budaya" (*the potential for forming and defining one's own identity, as an individual, and also as a culture*).¹⁶

Namun, hal ini tidak sesederhana kedengarannya. Dalam tulisan ini digambarkan, bagaimana 'multikulturalisme mainstream' dapat membantu menyelesaikan kerumitan yang terkait. Upaya-upaya sebelumnya untuk mengklarifikasi dasar-dasar teoritis pendidikan multikultural cenderung berfokus pada analisis literatur yang ada dengan menganjurkan perubahan pendidikan dengan nama 'Pendidikan Multikultural'.¹⁷

Karena kontroversi mengenai konsepsi multikulturalisme terus berlanjut, tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritis multikulturalisme dan pendidikan multikultural dalam

¹⁴ Saya mengikuti Fraser dalam penggunaan istilah ini. N. Fraser, (1998). *From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a "post-socialist" age*. Dalam C. Willett (Ed.), *Theorizing multiculturalism: A guide to the current debate*. Malden, MA & Oxford, Inggris: Blackwell Publishers Ltd.

¹⁵ C. Taylor, (1991). *The malaise of modernity*. Concord, Kanada: House of Anansi Press Limited; C. Taylor, (1994). *The politics of recognition*. Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (hal. 25-73). Princeton, NJ: Princeton University Press.

¹⁶ C. Taylor, (1994). *The politics of recognition*. Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (hal. 25-

73). Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 42.

¹⁷ J. Edwards, (1992). Multiculturalism and multicultural education in contemporary context.. *Canadian Ethnic Studies*, XXXIV(3), 23-34; L. Eldering, (1996). Multiculturalism and multicultural education in an international perspective. *Anthropology & Education Quarterly*, 27(3), 315-330; M.A. Gibson, (1976). Approaches to multicultural education in the United States: Some concepts and assumptions. *Anthropology & Education Quarterly*, 7(4), 7-18; S.P. Martin, (1993). The problem of multicultural education: Background, definitions and future agenda. *Multicultural Education Journal*, 11, 9-20; C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987). An analysis of multicultural education in the United States. *Harvard Educational Review*, 57 (4), p. 436).

masyarakat yang secara budaya beragam, liberal, dan demokratis. Tulisan ini secara khusus akan membahas kritik terhadap salah satu jenis multikulturalisme, yang akan disebut sebagai 'multikulturalisme mainstream' (*mainstream multiculturalism*), dan jenis 'pendidikan multikultural' yang didukung oleh para penganut 'multikulturalisme mainstream', yang akan disebut sebagai pedagogi yang relevan secara budaya.

ASUMSI-ASUMSI MULTIKULTURALISME

Dalam tulisan ini, diasumsikan bahwa pendidikan¹⁸ dapat dan harus memainkan peran utama dalam mengejar cita-cita sosial di dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan ini, Penulis tidak bermaksud bahwa pendidikan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan sosial. Penulis menyadari bahwa tujuan pribadi dan kesejahteraan semua anak secara signifikan terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat yang lebih besar dan bahwa kesejahteraan sosial dan pribadi tidak dapat sepenuhnya dipisahkan. Oleh karena itu, Penulis juga menyadari bahwa kita tidak bisa terlalu membebani pendidikan, seolah-olah pendidikan adalah satu-satunya sumber kesengsaraan sosial dan dengan mengubah pendidikan, kita

dapat menyelesaikan masalah seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, atau kemiskinan seorang diri. Sebaliknya, seperti Beck, Penulis menyadari bahwa pendidikan adalah bagian dari masyarakat dan pendidikan dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan sosial.¹⁹

Istilah budaya memerlukan beberapa klarifikasi karena istilah ini digunakan untuk merujuk pada berbagai konsepsi. Dalam tulisan ini, budaya digunakan dalam pengertian yang luas, seperti yang biasa digunakan, tetapi perlu dicatat bahwa budaya tidak selalu menyiratkan kerangka acuan yang sama dan koheren. Konsepsi budaya seperti itu menyiratkan bahwa budaya menentukan individu, memaksa individu untuk memprioritaskan tujuan kolektif dengan mengorbankan otonomi individu. Namun, untuk menerima determinisme seperti itu, terutama terhadap budaya non-Barat, seringkali menunjukkan eksotisme orang Barat. Sebaliknya, budaya disebut sebagai sumber identitas kolektif bagi para anggotanya. Di sini, Penulis mengikuti konsepsi Young tentang kelompok sosial. Dia menyatakan bahwa:

"[m]embers of a group have a specific affinity with one another because of their similar experience or way of life, which prompts them to

¹⁸ Istilah "*pendidikan*" (*education*) dan "*sekolah*" (*schooling*) digunakan secara bergantian dalam tulisan ini.

¹⁹ C.M. Beck, (1990). *Better schools: a values perspective*. London & New York: Falmer Press.

associate with one another more than with those not identified with the group, or in a different way" (anggota kelompok memiliki afinitas khusus satu sama lain karena pengalaman atau cara hidup mereka yang sama, yang mendorong mereka untuk bergaul satu sama lain lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak diidentifikasi dengan kelompok tersebut, atau dengan cara yang berbeda).²⁰

Deskripsi ini mungkin terdengar tidak jauh berbeda dengan konsepsi klasik tentang budaya. Memang, seperti banyak antropolog sebelumnya, Young mengakui hal itu:

"[a] person's particular sense of history, affinity, and separatedness, even the person's mode of reasoning, evaluating, and expressing feeling, are constituted partly by her or his group affinities". (Perasaan khusus seseorang akan sejarah, afinitas, dan keterpisahannya, bahkan

cara orang tersebut bernalar, mengevaluasi, dan mengekspresikan perasaan, sebagian dibentuk oleh afinitas kelompoknya).²¹

Namun, Young juga menekankan hal itu,

"[t]his does not mean that persons have no individual styles, or are unable to transcend or reject a group identity. Nor does it preclude persons from having many aspects that are independent of these group identities" (Hal ini tidak berarti bahwa seseorang tidak memiliki gaya individu, atau tidak dapat melampaui atau menolak identitas kelompok. Hal ini juga tidak menghalangi seseorang untuk memiliki banyak aspek yang tidak bergantung pada identitas kelompok ini).²²

Sangatlah penting untuk dicatat bahwa:

"social group is defined not primarily by a set of shared attributes, but a sense of identity" (kelompok sosial

²⁰ L.M. Young, (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 43.

²¹ L.M. Young, (1990), *Justice and the politics of difference*, hal. 45.

²² L.M. Young, (1990). *Justice and the politics of difference*, hal. 45.

didefinisikan bukan terutama oleh seperangkat atribut yang sama, tetapi oleh rasa identitas).²³

Istilah minoritas juga menjadi kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang ditunjukkan oleh Cummins, siswa "*minoritas*" menjadi "*mayoritas*" di beberapa daerah di Amerika Utara (misalnya, orang Asia-Amerika di beberapa bagian California).²⁴ Dengan kata lain, menjadi jelas bahwa perbedaan "*minoritas*" dan "*mayoritas*" bukan hanya masalah jumlah. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengikuti definisi bahwa minoritas mengacu pada: "*a group occupying a subordinate position in a multiethnic society, suffering from the disabilities of prejudice and discrimination, and maintaining a separate group identity*" (Kelompok yang menempati posisi subordinat dalam masyarakat multi-etnis, yang menderita akibat prasangka dan diskriminasi, dan mempertahankan identitas kelompok yang terpisah).²⁵

Perlu juga dicatat bahwa minoritas juga dapat dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti:

tersubordinasi; terpinggirkan secara budaya; dan non-dominan. Penulis berasumsi bahwa masyarakat demokratis, liberal, dan multikultural secara definisi berusaha untuk mewujudkan koeksistensi damai dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam secara budaya dengan menghormati sumber daya budaya mereka. Seperti yang dikatakan Gutmann,

"Multicultural societies and communities that stand for the freedom and equality of all people rest upon mutual respect for reasonable intellectual, political, and cultural differences" (Masyarakat dan komunitas multikultural yang mendukung kebebasan dan kesetaraan semua orang bertumpu pada rasa saling menghormati terhadap perbedaan intelektual, politik, dan budaya yang wajar).²⁶

Beberapa orang mungkin mempertanyakan apakah analisis umum tentang multikulturalisme

²³ L.M. Young, (1990). *Justice and the politics of difference*, hal. 44.

²⁴ J. Cummins, (1996a). *Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society*. Ontario, California: Asosiasi California untuk Pendidikan Bilingual.

²⁵ M.A. Gibson, (1991). Minorities and schooling: Some implications. In M.A. Gibson &

J.U. Ogbu (Eds.), *Minority status and schooling: A comparative study of immigrant and involuntary minorities* (hal. 357-381). New York: Garland Publishing, hal. 358).

²⁶ A. Gutmann, (1994). Introduction. Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 24.

dalam konteks demokrasi liberal dapat diterapkan pada negara-negara yang "unik" seperti Jepang. Memang ada beberapa diskusi mengenai apakah Jepang benar-benar liberal dan demokratis atau tidak. Sebagai contoh, Herzog menulis bahwa:

"[i]t can hardly be maintained that at present democracy is flourishing in Japan". (hampir tidak dapat dipertahankan bahwa saat ini demokrasi berkembang di Jepang).²⁷

Namun, Jepang adalah negara-bangsa modern yang mengklaim dirinya liberal dan demokratis. Demokrasi sulit untuk didefinisikan, tetapi prinsip-prinsip dasar dari sistem politik demokratis dapat diringkas sebagai berikut:

"Essentially, a democratic political system exists when political institutions provide opportunities for citizens to gain and exchange information, articulate opinions, and express their political viewpoints. Potential political leaders are free to compete for the support of these citizens. And governmental institutions ensure that state policies are

in some measure congruent with citizens' expressions of preference." (Pada dasarnya, sistem politik yang demokratis ada ketika lembaga-lembaga politik memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mendapatkan dan bertukar informasi, mengartikulasikan pendapat, dan mengekspresikan sudut pandang politik mereka. Para calon pemimpin politik bebas bersaing untuk mendapatkan dukungan dari warga negara. Dan lembaga-lembaga pemerintah memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara dalam beberapa hal sesuai dengan ekspresi preferensi warga negara).²⁸

Menurut Ishida dan Krauss, *"[b]y virtually any such empirical measure, contemporary Japanese institutions are democratic"*, (hampir semua ukuran empiris seperti itu, lembaga-lembaga Jepang kontemporer adalah demokratis),²⁹ meskipun, tentu saja, masih banyak ruang untuk demokratisasi.

²⁷ P.J. Herzog, (1993). *Japan's pseudo-democracy*. New York: New York University Press, hal. 10.

²⁸ T. Ishida, & E.S. Krauss, (1989). *Democracy in Japan: Issues and questions*. Dalam T. Ishida &

E. S. Krauss (Eds.), *Democracy in Japan* (hal. 3-16). Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, hal. 18.

²⁹ T. Ishida, & E.S. Krauss, (1989).

MENDEFINISIKAN MULTIKULTURALISME

Sekarang, bagaimana kita dapat memahami konsep yang kontroversial dan rumit seperti multikulturalisme, yang saat ini persepsinya berkisar pada *ideologi*³⁰ sampai *kulturalisme*?³¹ Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kebingungan ini adalah, seperti halnya pendidikan multikultural dan jenis multikulturalisme yang beragam.

Definisi multikulturalisme cenderung ambigu, seperti yang disampaikan Kymlicka:

"The term 'multiculturalism' covers many different forms of cultural pluralism, each of which raises its own challenges... Generalizations about the goals or consequences of multiculturalism can therefore be very misleading" (Istilah multikulturalisme meliputi berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, yang masing-masing memunculkan tantangan sendiri-sendiri... Oleh karena itu, generalisasi mengenai tujuan atau

konsekuensinya bisa jadi sangat menyesatkan).³²

Meskipun definisi multikulturalisme masih samar, namun ada konsensus yang muncul bahwa, sebagai alternatif dari model asimilasi, kita harus menghormati dan mempromosikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya tradisional dan cara-cara hidup di ruang publik. Poole mendefinisikan jenis multikulturalisme yang sedang berkembang ini sebagai berikut:

".... multiculturalism is a political principle which claims that the government should act so as to protect and sustain this social diversity: at the very least by preventing discrimination on the basis of cultural identity and not discriminating in its own practices ('negative multiculturalism'), and perhaps also by acting positively to ensure the continued viability of minority cultures ('positive multiculturalism')".
(....multikulturalisme adalah sebuah prinsip politik yang menyatakan bahwa

³⁰ R. Ng, (1995). Multiculturalism as ideology: A textual analysis. Dalam M. Campbell & A. Manicom (Ed.), *Knowledge, experience, and ruling relations: Studies in the social organization of knowledge* (hal. 35-48). Toronto, Kanada: University of Toronto Press.

³¹ D. Bromwich, (1995). Culturalism, the euthanasia of liberalism. *Dissent*, (Winter) 89-102.

³² W. Kymlicka (1995). *Multicultural citizenship*. Oxford, England: Clarendon Press, hal. 10.

pemerintah harus bertindak untuk melindungi dan mempertahankan keragaman sosial ini: paling tidak dengan mencegah diskriminasi atas dasar identitas budaya dan tidak melakukan diskriminasi dalam praktik-praktiknya sendiri ('multikulturalisme negatif'), dan mungkin juga dengan bertindak secara positif untuk memastikan kelangsungan hidup budaya minoritas ('multikulturalisme positif')).³³

Secara umum juga diterima bahwa bila berbeda dengan budaya dominan, warisan budaya asli dan identitas seseorang seharusnya dihargai dalam masyarakat yang lebih besar. Sebagai contoh, dengan membandingkan multikulturalisme dengan pluralisme, Feinberg menyatakan bahwa: "*Whereas pluralism allows cultural identity to flourish, the multicultural ideal encourages it to do so*" (ketika pluralisme mengizinkan identitas budaya berkembang sedangkan cita-

cita multikulturalisme mendorongnya untuk berkembang).³⁴

Ia juga menyatakan bahwa multikulturalisme adalah '*values cultural difference and authenticity, and seeks to maintain it in ways that are not solely dependent on the momentary interests of individuals*' (menghargai perbedaan dan keaslian budaya dan berusaha untuk mempertahankannya dengan cara yang tidak semata-mata tergantung pada kepentingan sesaat individu).³⁵

Oleh karena itu, secara umum, multikulturalisme dapat dipahami sebagai 'sebuah nilai dan prinsip politik yang bertujuan untuk mempromosikan koeksistensi yang damai dan bermakna antara kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya dengan melindungi warisan budaya dan identitas masyarakat' (*a value and political principle that intends to promote peaceful and meaningful coexistence of culturally diverse groups by protecting people's cultural heritage and identity*).

Untuk memudahkan diskusi, definisi *mainstream multiculturalism* inilah yang menjadi dasar diskusi ini. Definisi ini dirujuk dari waktu ke waktu sebagai tesis pengakuan budaya. Dalam

³³ R. Poole, (1996). National identity, multiculturalism, and Aboriginal rights: An Australian perspective. Dalam J. Couture, K. Nielsen, & M. Seymour (Eds.), *Rethinking nationalism (Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 22)* (Vol. 22, hal. 407 -

438). Calgary, Kanada: University of Calgary Press, hal. 410.

³⁴ W. Feinberg, (1996). *The goals of multicultural education: A critical re-evaluation*, hal. 1.

³⁵ W. Feinberg, (1996), hal. 1.

tulisan ini saat penulis mengatakan masyarakat multikultural, penulis merujuk pada masyarakat yang mencoba untuk mematuhi nilai-nilai yang diungkapkan dalam definisi di atas.

Sebelum membahas kontroversi multikulturalisme secara lebih rinci, perlu disebutkan bahwa penulis tidak bermaksud untuk membahas semua aspek multikulturalisme dalam tulisan ini. Sebagai contoh, Kymlicka merinci tiga belas jenis kebijakan dan program yang dipraktekkan dan diusulkan di bawah "rubrik multikulturalisme" (*the rubric of 'multiculturalism'*) dalam perdebatan publik.³⁶ Setiap kategori, kata Kymlicka, merupakan aspek penting dari multikulturalisme namun kategorisasi ini terlalu komprehensif untuk tujuan tulisan di sini.

Sebagai contoh, kategori pertama dalam daftar tersebut adalah "program tindakan afirmatif" (*affirmative action programs*); kategori keenam adalah "program pendidikan anti-rasisme" (*anti-racism educational programs*).³⁷ Tentu saja tidak mungkin untuk membahas setiap isu multikulturalisme.

Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis multikulturalisme yang paling relevan. Setiap jenis mencirikan persepsi tertentu tentang

multikulturalisme, meskipun tidak serta merta mengesampingkan yang lain. Penulis tidak bermaksud menunjukkan bahwa satu persepsi lebih baik dari yang lain, kecuali untuk kasus multikulturalisme dominan. Persepsi yang berbeda diberikan untuk menggambarkan bahwa ada berbagai pandangan yang berbeda tentang multikulturalisme.

Mengenai definisi multikulturalisme, dapat ditunjukkan bahwa kerumitan istilah ini setidaknya disebabkan karena istilah ini diterapkan dalam berbagai konteks internasional. *Random House Webster's College Dictionary* melacak asal-usul istilah ini sekitar tahun 1960-65 dalam konteks Amerika Serikat, tetapi istilah ini digunakan secara internasional setelah tahun 1971 ketika multikulturalisme menjadi kebijakan resmi pemerintah Kanada, lalu menyebar ke Amerika Serikat, Australia, dan Eropa Barat.³⁸ Istilah ini sekarang menjadi sangat populer terutama di negara-negara tersebut meskipun multikulturalisme sebagai kebijakan resmi hanya ada di Kanada dan Australia.

Salah satu cara untuk memperjelas situasi ini adalah dengan membedakan multikulturalisme Kanada dengan multikulturalisme

³⁶ W. Kymlicka (1995). *Multicultural citizenship*. Oxford, Inggris: Clarendon Press, hal. 42.

³⁷ W. Kymlicka (1995).

³⁸ Schierup, C.-U. (1997). *Multiculturalism and universalism in the United States and EU-*

Europe. Dalam H.-R. Wicker (Ed.), *Rethinking nationalism and ethnicity: The struggle for meaning and order in Europe* (hal. 111-126). Oxford, Inggris & New York: Berg, hal. 111.

Amerika, Australia, dan seterusnya. Bahkan di dalam suatu negara, terdapat berbagai konsepsi multikulturalisme, dan kita juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis multikulturalisme tertentu yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, penulis tidak akan membatasi multikulturalisme pada konteks masyarakat tertentu. Sebaliknya, penulis akan membahasnya terutama mengenai tema implikasinya terhadap pendidikan dalam konteks masyarakat modern, liberal, dan demokratis.

JENIS-JENIS MULTIKULTURALISME Multikulturalisme Oposisi (*Oppositional Multiculturalism*)

Salah satu karakteristik yang melekat pada multikulturalisme adalah bahwa multikulturalisme oposisi dengan konsep negara-bangsa modern.³⁹ Negara-bangsa adalah konsep politik yang mengasumsikan satu budaya, bahasa, dan kebijakan nasional di dalam kedaulatannya. Seperti yang dikatakan Poole,

"the characteristic modern form of the state is the nation state, i.e., the state whose legitimacy depends on its claim to represent a community defined by its culture" (bentuk negara modern yang khas adalah negara bangsa, yaitu negara yang legitimasinya bergantung pada klaimnya untuk mewakili komunitas yang didefinisikan oleh kebudayaannya).⁴⁰

Dalam komunitas seperti itu, pemerintah berasumsi bahwa masyarakat yang dilayaninya hanya memiliki satu budaya yang sama dengan warga negara. Keanekaragaman budaya cenderung diabaikan atau dipinggirkan dalam menghadapi tuntutan kohesi sebagai sebuah komunitas politik. Tuntutan ini disebut *'homosociality'* (homososialitas) oleh Sakai. Membahas masyarakat dalam konteks modern, ia menggambarkan karakteristik

³⁹ Di sini, Kanada dapat dianggap sebagai pengecualian karena Kanada beroperasi di bawah sistem federal yang mengakui lebih dari satu "bangsa". Namun demikian, dalam literatur Kanada kita juga dapat menemukan banyak seruan untuk sebuah budaya yang bersatu, bukan hanya multi-bangsa (misalnya, Bisson dan Gairdner). Lihat N. Bissondath, (1994). *Selling illusions: The cult of multiculturalism in Canada*. Harmondsworth, England: Penguin

Books; W.D. Gairdner, (1990). *The trouble with Canada*. Toronto, Canada: Stoddart.

⁴⁰ R. Poole, (1996). National identity, multiculturalism, and Aboriginal rights: An Australian perspective. Dalam J. Couture, K. Nielsen, & M. Seymour (Eds.), *Rethinking nationalism (Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 22)* (Vol. 22, hal. 407 - 438). Calgary, Kanada: University of Calgary Press, hal. 417.

pandangan dunia yang khas sebagai berikut:

"In modernism, boundaries of each entity such as national community, culture, language, society, economy (and we might as well add ethnicity and race to this list) are thought of as if they all are piled up and matched together... In spite of numerous exceptions and counter examples, it is extremely difficult for us to free ourselves from this request that these boundaries have to match."

(Dalam modernisme, batas-batas setiap entitas seperti komunitas nasional, budaya, bahasa, masyarakat, ekonomi (dan kita juga dapat menambahkan etnisitas dan ras ke dalam daftar ini) seolah-olah semuanya dianggap ditumpuk dan dicocokkan bersama... Terlepas dari banyaknya pengecualian dan contoh-contoh tandingan, sangat sulit bagi kita untuk membebaskan

diri dari tuntutan bahwa batas-batas ini harus sama).⁴¹

Sebagian multikulturalisme menjadi kontroversial sebab perlawanannya terhadap kekuatan konsepsi modern yang telah diterima secara luas tentang kesatuan politik – gagasan bahwa satu komunitas politik haruslah terikat oleh suatu budaya yang sama. Goldberg menggunakan istilah *monoculturalism* (monokulturalisme) dan bukan *homosociality* (*homososialitas*) dan mengklaim bahwa multikulturalisme muncul sebagai perlawanan terhadap monokulturalisme.⁴²

Asumsi dasar bahwa kita harus memiliki budaya yang sama sebagai dasar persatuan politik, misalnya, telah didukung oleh teori asimilasi "*melting pot*" dalam konteks Amerika Serikat.⁴³ Dalam proses pembangunan bangsa, negara-negara Barat lainnya percaya bahwa mereka membutuhkan kebijakan asimilasi yang kuat untuk mencapai identitas nasional yang sama. Budaya dominan dipaksakan dengan kuat pada kelompok minoritas dan keturunan mereka. Dan penduduk Asia, kulit hitam, dan penduduk asli sering

⁴¹ N. Sakai, (1996). *Shizan sareru Nihongo/Nihon jin [Stillborn Japanese language and people: The historic-geopolitical location of "Japan"]*. Tokyo: Shinyo sha, hal. 171.

⁴² D.T. Goldberg, (1994). Introduction: Multicultural conditions. Dalam D.T. Goldberg

(Ed.), *Multiculturalism: A critical reader* (hal. 1-44), Cambridge: Blackwell Publishers, hal. 7.

⁴³ M.M. Gordon, (1964). *Assimilation in American life*. New York: Oxford University Press.

dianggap tidak dapat berasimilasi, bahkan ketika keberadaan mereka telah mendahului pembentukan kesatuan politik Barat, dan mereka dipaksa untuk tetap menjadi bukan warga negara kelas dua. Dalam konteks sejarah dan politik ini, kelompok-kelompok etnis yang telah lama terpinggirkan di Amerika Serikat dan Kanada –seperti orang Chicano, orang Latin, orang Indian Amerika dan suku bangsa pertama, serta orang Quebec—dapat dibedakan dengan para imigran sebagai kelompok minoritas nasional sebab mereka dimasukkan ke dalam sistem politik yang ada saat ini secara paksa. Multikulturalisme dalam konteks ini menuntut pengakuan budaya dan politik terhadap kelompok-kelompok minoritas ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang minoritas nasional, multikulturalisme merupakan gerakan perlawanan terhadap homososialitas yang dituntut oleh negara-bangsa modern. Dengan demikian, multikulturalisme pasti memiliki aspek *oposisi* terhadap asalnya.

Kekuatan oposisi yang menentang budaya yang sama dan bersatu dalam satu kesatuan politik telah diperkuat oleh tren lain di negara-negara Barat: *'a shift in immigration policies'*

(pergeseran kebijakan imigrasi). Negara-negara ini memiliki kebijakan imigrasi secara ketat sampai sekitar tahun 1950-an, sebagian karena keinginan untuk membangun sebuah negara dengan budaya yang sama dan sebagian lagi karena ada cukup banyak imigran yang tersedia dari negara asal. Namun, sejak tahun 1960-an, kebijakan imigrasi semakin dilonggarkan untuk memasukkan pekerja dari Asia dan Afrika yang dibutuhkan dan orang Inggris atau Eropa lebih sedikit yang ingin beremigrasi.⁴⁴ Kelompok penguasa mayoritas di negara-negara ini kemudian membutuhkan taktik baru untuk menghadapi keragaman budaya yang semakin "terlihat" (*visible*).⁴⁵ Teori asimilasi ditantang oleh masuknya imigran yang lebih beragam secara budaya dan ras.

Perubahan demografis ini telah membantu meningkatkan kebutuhan akan solusi multikultural.

Multikulturalisme Dominan (Dominant Multiculturalism)

Sifat 'multikulturalisme oposisi' seringkali berkurang karena kelompok sosial yang dominan telah mencoba menggantikan kebijakan asimilasi dengan multikulturalisme. Karena alasan-alasan di atas, diskursus

⁴⁴ R.J. Samuda, (1989). Multiculturalism: Perspectives and challenges, *Assessment and placement of minority students* (hal. 5-14). Toronto, Kanada: C.J. Hogrefe, hal. 6-8.

⁴⁵ R. Poole, (1996). National identity, multiculturalism, and Aboriginal rights: An

Australian perspective.. Dalam J. Couture, K. Nielsen, & M. Seymour (Eds.), *Rethinking nationalism (Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 22)* (Vol. 22, hal. 407 - 438). Calgary, Kanada: University of Calgary Press.

multikulturalisme dominan semakin cenderung menggambarkan keragaman budaya dalam masyarakat yang lebih besar. Kita dapat melihat penggunaan istilah tersebut, misalnya, seperti yang ditulis dengan bangga oleh Perdana Menteri Kanada, Jean Chretien:

"Multiculturalism is a defining characteristic of our country. Cultural diversity is both a fact of life in Canada and a vital Canadian value. Through generation upon generation, Canadians have built a nation on the principles of democracy, opportunity, fairness, cooperation and mutual respect. Those principles have made our country the envy of the world."

(Multikulturalisme adalah karakteristik yang menentukan negara kami. Keanekaragaman budaya merupakan fakta kehidupan di Kanada dan menjadi nilai penting Kanada. Dari generasi ke generasi, warga Kanada telah membangun negara dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesempatan, keadilan, kerja sama, dan saling menghormati. Prinsip-prinsip tersebut telah

membuat negara kami diiri oleh dunia lain).⁴⁶

Pengakuan demografis terhadap multikulturalisme semacam ini dapat dianggap sebagai isyarat terhadap keragaman budaya sebagai sebuah nilai tanpa menerima sifat multikulturalisme oposisi.

Namun, persepsi multikulturalisme ini tidak hanya tidak berlawanan, tetapi juga tidak akurat. Jika multikulturalisme hanya mencerminkan keberadaan keragaman budaya dalam masyarakat tertentu, istilah multikulturalisme tidak diperlukan. Konsep multikulturalisme muncul karena diperlukan untuk menggambarkan dan mengkonseptualisasikan fenomena tertentu dalam keadaan sosio-historis tertentu. Keanekaragaman budaya telah menjadi norma dan bukan pengecualian sepanjang sejarah dan dunia. Sebagai contoh, Kekaisaran Ottoman, yang didirikan pada abad ke-13 dan mencapai puncak teritorialnya pada abad ke-16, yang memerintah beberapa wilayah di Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman agama, budaya, dan etnis. Tentu saja dari abad ke-16 hingga abad ke-19, ketika kekaisaran menikmati kemakmuran terbesarnya, umat Islam menoleransi keragaman agama Kristen,

⁴⁶ J. Chretien, (1997). *Introduction. Annual report on the operation of the Canadian*

Multiculturalism Act. Ottawa: Departemen Warisan Kanada.

Yahudi, dan lainnya, memanfaatkan kemampuan non-Muslim untuk keuntungan umat Islam.⁴⁷ Atau kita bisa memikirkan Jepang, katakanlah, sekitar dua ratus tahun yang lalu. Meskipun sekarang banyak yang percaya bahwa Jepang adalah salah satu negara yang paling homogen secara budaya di dunia, Jepang relatif terkenal dengan budaya pedagang dan pengrajin (*chonin*) yang semarak selama periode Edo, yang sangat kontras dengan budaya kelas penguasa (*samurai*). Namun, kedua masyarakat ini, meskipun memiliki keragaman budaya, tidak dianggap sebagai multikultural.

Pengakuan demografis terhadap berbagai budaya dalam satu pemerintahan di Barat cenderung "merayakan" (*celebrate*) keanekaragaman budaya; namun seringkali hal ini hanya mendorong pemahaman yang dangkal tentang budaya, menyebarkan eksotisme dan komodifikasi budaya non-Barat. Penulis menyebut jenis multikulturalisme ini sebagai multikulturalisme dominan, karena mengistimewakan budaya Eropa yang dominan.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa multikulturalisme akan menjadi dominan saat mendapatkan legitimasi resmi. Mendapatkan legitimasi resmi terkadang dapat meningkatkan rasa

frustrasi dari suara-suara yang sebelumnya tidak diakui, namun hal ini tidak seharusnya terjadi ketika multikulturalisme berkembang. Sebagai contoh, dengan mengkaji proses sejarah dimana multikulturalisme diterapkan secara resmi. McRoberts berpendapat bahwa "*Canadian multiculturalism has been used to dismantle Quebec nationalism*" (multikulturalisme Kanada telah diterapkan untuk menghancurkan nasionalisme Quebec).⁴⁸ Akibatnya, Undang-Undang Multikultural (*the Multicultural Act*) telah menarik sebagian besar warga Kanada keturunan Inggris, tanpa dukungan dari warga Quebec. Maka, orang dapat berargumen bahwa multikulturalisme resmi di Kanada tidak akan mewujudkan suara-suara oposisi. Jika demikian, kita harus mempertimbangkan bahwa multikulturalisme Kanada hanya dapat mewakili jenis multikulturalisme yang dominan.

Namun, perbedaan antara multikulturalisme oposisi dan multikulturalisme dominan seharusnya tidak hanya mencerminkan keberadaan kebijakan multikultural secara resmi. Harus ada contoh multikulturalisme resmi yang mengakomodasi aspek-aspek multikulturalisme oposisi. Selain itu, bahkan jika McRoberts benar dalam

⁴⁷ Yamauchi, M. (1996). *Minzoku mondai nyumon [Introduction to Ethnic Problems]*. Tokyo: Chuokoron Sha, pp. 122-132.

⁴⁸ K. McRoberts, (1997). *Misconceiving Canada: The struggle for national unity*. Toronto, Canada: Oxford University Press.

menunjukkan bahwa kebijakan multikultural Kanada saat ini tidak menarik bagi orang Quebec, mungkin saja ada multikulturalisme yang dapat diterima oleh orang Quebec. Tampaknya inilah yang dieksplorasi oleh Charles Taylor dan Will Kymlicka, pendukung multikulturalisme Kanada, dalam tulisan-tulisan keduanya.

Multikulturalisme Liberal dan Multikulturalisme Mainstream

Bagaimana liberalisme dapat mengakomodasi multikulturalisme masih menjadi kontroversi. Dalam tulisan ini, diasumsikan bahwa liberalisme tidak memusuhi gagasan multikulturalisme. Sebagai sebuah prinsip dan nilai politik yang berkaitan dengan pemeliharaan keragaman budaya, multikulturalisme telah berjuang untuk mendapatkan legitimasinya dalam kerangka liberal. Hal ini karena, perlindungan terhadap suatu budaya dilihat sebagai sesuatu yang melibatkan penghargaan dan pemeliharaan tradisi budaya, bahkan ketika tradisi tersebut membatasi otonomi pribadi dan refleksi kritis yang penting bagi liberalisme. Oleh karena itu, kaum liberal, yang khawatir dengan kemungkinan bahwa mengakui hak-hak budaya dapat mengesampingkan hak-hak individu, mengusulkan agar penekanan pada budaya tidak diartikulasikan terlalu kuat. Walzer

menyebut liberalisme semacam ini sebagai:

"Liberalism I', which is 'committed in the strongest possible way to individual rights and... to a rigorously neutral state, that is, a state without cultural or religious projects or, indeed, any sort of collective goals beyond the personal freedom and the physical security, welfare, and safety of its citizens". ('Liberalisme I', yang 'berkomitmen sekuat mungkin pada hak-hak individu dan... pada negara yang sangat netral, yaitu negara yang tidak memiliki proyek-proyek budaya atau agama atau, bahkan, tujuan kolektif apapun di luar kebebasan pribadi dan keamanan fisik, kesejahteraan, dan keselamatan warganya".⁴⁹

Serupa dengan gagasan *"multikulturalisme negatif" (negative multiculturalism)* yang dikemukakan oleh Poole, beberapa kaum liberal berpikir bahwa perlindungan terhadap warisan budaya dan identitas paling baik dilakukan dengan sangat mendukung hak-hak individu dan

⁴⁹ M. Walzer, (1995). Comment. Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the*

politics of recognition (hal. 99-103). Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 99.

mengurangi bias-bias budaya masyarakat luas.⁵⁰

Di sisi lain, para pendukung 'multikulturalisme mainstream' berpendapat bahwa multikulturalisme harus direalisasikan secara berbeda dalam masyarakat yang liberal dan demokratis. Para pendukung 'multikulturalisme mainstream' lebih memilih jenis liberalisme yang disebut Walzer sebagai:

"'Liberalisme 2', yang 'allows for a state committed to the survival and flourishing of a particular nation, culture, or religion, or of a (limited) set of nations, cultures, and religions- so long as the basic rights of citizens who have different commitments or no such commitments at all are protected'." (mengizinkan sebuah negara yang berkomitmen pada kelangsungan hidup dan berkembangnya bangsa, budaya, atau agama tertentu, atau sekumpulan bangsa, budaya, dan agama (terbatas) selama hak-hak

dasar warga negara yang memiliki komitmen yang berbeda atau tidak memiliki komitmen sama sekali tetap terlindungi).⁵¹

Hal ini sekali lagi mirip dengan "multikulturalisme positif" (*positive multiculturalism*) dari Poole.⁵² Persepsi multikulturalisme ini tampaknya yang paling dekat dengan definisi umum multikulturalisme yang dikemukakan sebelumnya.

Bagi sebagian orang, 'multikulturalisme mainstream' tampaknya mengakomodasi perspektif oposisi dan liberal tentang multikulturalisme, tetapi banyak kritikus menganggap 'multikulturalisme mainstream' sebagai produk kompromi belaka yang kehilangan pandangan terhadap isu-isu yang lebih kritis seperti otonomi pribadi atau kapasitas kritis. Abstraksi "keragaman budaya," (*cultural diversity*) yang menjauh dari posisi sosio-historis yang konkret dan unik dari semua "budaya," (*cultures*) telah mengaburkan maksud dari 'multikulturalisme dominan'.

⁵⁰ R. Poole, (1996). National identity, multiculturalism, and Aboriginal rights: An Australian perspective. Dalam J. Couture, K. Nielsen, & M. Seymour (Eds.), *Rethinking nationalism (Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 22)* (Vol. 22, hal. 407 - 438). Calgary, Kanada: University of Calgary Press.

⁵¹ M. Walzer, (1995). Komentar. Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the*

politics of recognition (hal. 99-103). Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 99.

⁵² R. Poole, (1996). National identity, multiculturalism, and Aboriginal rights: An Australian perspective. Dalam J. Couture, K. Nielsen, & M. Seymour (Eds.), *Rethinking nationalism (Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 22)* (Vol. 22, hal. 407 - 438). Calgary, Kanada: University of Calgary Press.

Pentingnya 'multikulturalisme mainstream' dalam menyelesaikan kontroversi multikulturalisme merupakan tema utama dari tulisan ini, dan diskusi tentang 'multikulturalisme mainstream'.

Penulis ingin menambahkan bahwa konotasi negatif dari liberalisme, terutama sejak tahun 1980-an, ketika neo-konservatisme mendominasi iklim politik di Amerika Serikat dan di tempat lain. Sebagai contoh, McLaren menyatakan bahwa *liberal multiculturalism* (multikulturalisme liberal) gagal dalam menantang ideologi asimilasi karena kaum multikulturalis liberal secara keliru mengasumsikan adanya kesetaraan relatif antara masyarakat mainstream dan minoritas budaya.⁵³ Ini adalah pandangan bahwa "multikulturalisme liberal" (*liberal multiculturalism*) pada dasarnya sama dengan multikulturalisme mainstream. Namun, ini bukanlah interpretasi yang ingin diterapkan pada multikulturalisme liberal. Dalam tulisan ini, liberalisme dipahami dalam pengertian yang lebih luas, dengan

nilai-nilai esensialnya dilihat sebagai otonomi individu dan refleksi kritis.

DISKUSI

Meninjau literatur mengenai pendidikan multikultural dan multikulturalisme, kita melihat bahwa ada banyak sekali keberatan terhadap pendidikan multikultural dan multikulturalisme, baik di tingkat teoritis maupun praktis. Secara khusus, kita dihadapkan pada sejumlah besar kritik terhadap perlakuan khusus terhadap kelompok-kelompok orang berdasarkan kekhususan kelompok, seperti etnis dan agama. Kritik ini datang dari 'kaum liberal yang individualistis' (*individualistic liberals*)⁵⁴ dan juga 'para pendidik yang kritis' (*critical educators*), meskipun dengan alasan yang berbeda. Jika kita menerima keberatan terhadap multikulturalisme seperti ini, maka tidak tepat untuk mendukung pendidikan yang memasukkan warisan budaya siswa dalam masyarakat yang beragam secara budaya. Apa yang disebut sebagai pedagogi yang relevan dengan budaya⁵⁵ atau pendidikan yang

⁵³ p. McLaren, (1993). White terror and oppositional agency: Towards a critical multiculturalism. *Strategies*, 7, 99-131.

⁵⁴ C. Kukathas, (1992). Are there any cultural rights? *Political Theory*, 20(1), 105-139; A.O. Rorty, (1994). The hidden politics of cultural identification. *Political Theory*, 22(1), 152-166; B. Walker, (1997). Plural cultures, contested territories: A critique of Kymlicka. *Canadian Journal of Political Science*, 30(2), 213-234.

⁵⁵ G. Ladson-Billings, (1995a). But that's just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. *Theory into Practice*, 34(3), 159-165; G. Ladson-Billings, (1995b). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465-491; F. Maina, (1997). Culturally relevant pedagogy: First Nations education in Canada. *The Canadian Journal of Native Studies*, XV/1(2), 293-314; A.B. Osborne, (1996). Practice into theory into practice: Culturally relevant

sesuai dengan budaya⁵⁶ dengan demikian akan sangat terpinggirkan dalam dunia pendidikan.

Dalam tulisan ini, multikulturalisme dilihat sebagai sesuatu yang seringkali memiliki kualitas oposisi baik ketika ada kebijakan resmi maupun tidak. Dan diakui bahwa tidak semua kebijakan multikultural resmi bersifat dominan. Multikulturalisme dominan, pada kenyataannya, tidak sesuai dengan definisi multikulturalisme yang dijelaskan di atas dan yang diperjuangkan saat ini.

Penelitian berikutnya sebaiknya mempertanyakan aspek-aspek keberatan multikulturalisme termasuk kritik atas realisasi 'multikulturalisme mainstream' yang dikembangkan oleh Charles Taylor dan Will Kymlicka. Peneliti berikutnya harus menilai secara kritis kritik-kritik multikulturalisme, mengklarifikasi isu-isu yang diangkat oleh kritik-kritik tersebut. Juga, mengeksplorasi argumen-argumen 'multikulturalisme mainstream', daripada mengkritik ketidakjelasan konsep tersebut. Melalui proses ini, akan menjadi lebih jelas bagaimana 'multikulturalisme mainstream' dipahami, dan apa yang sebenarnya atau seharusnya.

KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, multikulturalisme dapat dipahami sebagai 'sebuah nilai dan prinsip politik yang bertujuan untuk mempromosikan koeksistensi yang damai dan bermakna antara kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya dengan melindungi warisan budaya dan identitas masyarakat'.

Kedua, ada empat jenis multikulturalisme, yaitu: oposisi (*oppositional*), dominan (*dominant*), liberal (*liberal*), dan 'multikulturalisme mainstream' (*mainstream multiculturalism*).

Ketiga, 'Multikulturalisme mainstream' tidak mendukung identitas budaya yang terpisah, nasionalisme budaya, atau determinisme budaya seperti yang diklaim oleh banyak pengkritik multikulturalisme. Dua kelompok besar pengkritik, yaitu kaum liberal-individualis dan pendidik kritis, cenderung menyangkal 'multikulturalisme mainstream' ketika mereka mencoba mengajukan prinsip multikulturalisme yang bersifat universal. Namun, Penulis akan berargumen bahwa penerapan universal inilah yang menjadi masalah bagi kaum multikulturalisme

pedagogy for students we have marginalized and normalized. *Anthropology & Education Quarterly*, 27(3), 285-314.

⁵⁶ S. Nieto, (1996). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education*. (2 ed.). White Plains, NY: Longman , hal. 145-147.

mainstream. Penulis akan menunjukkan bahwa ada beberapa konteks tertentu di mana 'multikulturalisme mainstream' bisa dan semestinya diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (1992). Toward a cross-cultural approach to defining international standards of human rights: The meaning of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. In A.A. An-Na'im (Ed.), *Human rights in cross-cultural perspectives: A quest for consensus* (pp. 19-43). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Appiah, K.A. (1994b). *Identity against culture: Understandings of multiculturalism*. (Vol. 1). Berkeley, CA: The Regents of the University of California.
- Asimov, N. (1998, March 21). S.F. high schools to get diverse authors list [Online].
- Banks, J.A. (1994). *Multiethnic education: Theory and practice*. (Third ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Beck, C.M. (1990). *Better schools: a values perspective*. London & New York: Falmer Press.
- Bissondath, N. (1994). *Selling illusions: The cult of multiculturalism in Canada*. Harmondsworth, England: Penguin Books.
- Bromwich, D. (1995). Culturalism, the euthanasia of liberalism. *Dissent, (Winter)* 89-102.
- Burtonwood, N. (1986). *The culture concept in educational studies*. Berkshire, UK: The NGER-NELSON Publishing Company.
- Chretien, J. (1997). Introduction. *Annual report on the operation of the Canadian Multiculturalism Act*. Ottawa: Department of Canadian Heritage
- Commission on Multicultural Education. (1973). No one model American. *Journal of Teacher Education*, 24(Winter), 264-265.
- Cummins, J. (1996a). *Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society*. Ontario, California: California Association for Bilingual Education.
- Cummins, J. (1996b). Foreword, *Affirming diversity: Sociopolitical context of multicultural education* (pp. xv-xvii). New York: Longman.
- Edwards, J. (1992). Multiculturalism and multicultural education in contemporary context. *Canadian Ethnic Studies*, XXXIV(3), 23-34.
- Eldering, L. (1996). Multiculturalism and multicultural education in an international perspective. *Anthropology & Education Quarterly*, 27(3), 315-330.
- Feinberg, W. (1995). Liberalism and the aims of multicultural education. *Journal of Philosophy of Education*, 29(2), 203-216.

- Feinberg, W. (1996). *The goals of multicultural education: A critical re-evaluation* [Online].
- Fierlbeck, K. (1996). The ambivalent potential of cultural identity. *Canadian Journal of Political Science*, XXIX(1), 3-22.
- Fraser, N. (1998). From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a "post-socialist" age. In C. Willett (Ed.), *Theorizing multiculturalism: A guide to the current debate*. Malden, MA & Oxford, England: Blackwell Publishers Ltd.
- Fullinwider, R.K. (1996). Multicultural education: concepts, policies, and controversies. In R.K. Fullinwider (Ed.), *Public education in a multicultural society: Policy, theory, critique* (pp. 3-22). Cambridge: Cambridge University Press.
- Gairdner, W.D. (1990). *The trouble with Canada*. Toronto, Canada: Stoddart.
- Gibson, M.A. (1976). Approaches to multicultural education in the United States: Some concepts and assumptions. *Anthropology & Education Quarterly*, 7(4), 7-18.
- Gibson, M.A. (1991). Minorities and schooling: Some implications. In M.A. Gibson & J.U. Ogbu (Eds.), *Minority status and schooling: A comparative study of immigrant and involuntary minorities* (pp. 357-381). New York: Garland Publishing.
- Goldberg, D.T. (1994). Introduction: Multicultural conditions. In D.T. Goldberg (Ed.), *Multiculturalism: A critical reader* (pp. 1-44), Cambridge: Blackwell Publishers.
- Gollnick, D.M., Klassen, F. H., and Yff, J. (1976). *Multicultural education and ethnic studies in the United States: An analysis and annotated bibliography of selected ERIC documents*. Washington, D.C.: American Association of Colleges for Teacher Education, ERIC Clearinghouse on Teacher Education.
- Gordon, M.M. (1964). *Assimilation in American life*. New York: Oxford University Press.
- Guthrie, J. (1998, March 10). S.F. board of education ready to require that up to 70% of students' required reading be by people of color [Online].
- Gutmann, A. (1994). Introduction. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Herzog, P.J. (1993). *Japan's pseudo-democracy*. New York: New York University Press.
- Hoffman, D.M. (1996). Culture and self in multicultural education: Reflections on discourse, text, and practice. *American Educational Research Journal*, 33(3), 545-569.
- Ishida, T., & Krauss, E.S. (1989). Democracy in Japan: Issues and questions. In T. Ishida & E. S. Krauss (Eds.), *Democracy in Japan* (pp. 3-16). Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.

- Kukathas, C. (1992). Are there any cultural rights? *Political Theory*, 20(1), 105-139.
- Kymlicka, W. (1989). *Liberalism, community and culture*. Oxford, England & New York: Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship*. Oxford, England: Clarendon Press.
- Kymlicka, W. (1998). *Finding our way: Rethinking ethnocultural relations in Canada*. Don Mills, Canada: Oxford University Press.
- Ladson-Billings, G. (1995a). But that's just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. *Theory into Practice*, 34(3), 159-165.
- Ladson-Billings, G. (1995b). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465-491.
- Macedo, S. (1995). Liberal civic education and religious fundamentalism: The case of God v. John Rawls? *Ethics*, 105, 468-496.
- Maina, F. (1997). Culturally relevant pedagogy: First Nations education in Canada. *The Canadian Journal of Native Studies*, XV/1(2), 293-314.
- Martin, S.P. (1993). The problem of multicultural education: Background, definitions and future agenda. *Multicultural Education Journal*, 11, 9-20.
- McCabe, C. (1986). Broken English. *Critical Quarterly*, 28 (1&2), 3-14.
- McCarthy, C. (1994). Multicultural discourses and curriculum reform: A critical perspective. *Educational Theory*, 44(1), 81-98.
- McLaren, P. (1993). White terror and oppositional agency: Towards a critical multiculturalism. *Strategies*, 7, 99-131.
- McLaren, P. (1995). *Critical pedagogy and predatory culture: Oppositional politics in a postmodern era*. London and New York: Routledge.
- McLaren, P., & Lankshear, C. (1994). *Politics of liberation: paths from Freire*. London & New York: Routledge.
- McLaren, P., & Leonard, p. (1993). *Paulo Freire: a critical encounter*. London & New York: Routledge.
- McLaughlin, T.H. (1992). The ethics of separate schools. In M. Leicester & M. Taylor (Eds.), *Ethics, ethnicity, and education*. London: Kogan Page Limited.
- McRoberts, K. (1997). *Misconceiving Canada: The struggle for national unity*. Toronto, Canada: Oxford University Press.
- Michalski, C. (1977). Teacher education for a multicultural society: Some global trends and the Ontario Ministry of Education position. In V. D'Oyley (Ed.), *The impact of multi-ethnicity on Canadian education*. Toronto, Canada: The Urban Alliance on Race Relations.
- Mill, J.S. (1956). *On liberty*. C.V. Shields (Ed.). New York: The Liberal Arts Press.

- Mullard, C. (1982). Multiracial education in Britain: From assimilation to cultural pluralism. In J. Tierney (Ed.), *Race, migration and schooling*. London: Halt.
- Mullard, C. (1984). *Anti-racist education. The three 'o's*. National Association for Multiracial Education.
- Ng, R. (1995). Multiculturalism as ideology: A textual analysis. In M. Campbell & A. Manicom (Ed.), *Knowledge, experience, and ruling relations: Studies in the social organization of knowledge* (pp. 35-48). Toronto, Canada: University of Toronto Press.
- Nieto, S. (1996). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education*. (2 ed.). White Plains, NY: Longman.
- Olneck, M. (1990). The recurring dream: Symbolism and ideology in intercultural and multicultural education. *American Journal of Education*, 98(2), 147-74.
- Osborne, A.B. (1996). Practice into theory into practice: Culturally relevant pedagogy for students we have marginalized and normalized. *Anthropology & Education Quarterly*, 27(3), 285-314.
- Poole, R. (1996). National identity, multiculturalism, and Aboriginal rights: An Australian perspective. In J. Couture, K. Nielsen, & M. Seymour (Eds.), *Rethinking nationalism (Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 22)* (Vol. 22, pp. 407- 438). Calgary, Canada: University of Calgary Press.
- Pratte, R. (1983). Multicultural education: Four normative arguments. *Educational Theory*, 33, 21-32.
- Redfield, R. (1956). *Peasant society and culture: An anthropological approach to civilization*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Rezai-Rashti, G. (1995). Multicultural education, anti-racist education, and critical pedagogy: Reflections on everyday practice. In R. Ng, p. Staton, & J. Scane (Eds.), *Anti-racism, feminism; and critical approaches to education* (pp. 3-19). Toronto, Canada: OISE Press.
- Rorty, A.O. (1994). The hidden politics of cultural identification. *Political Theory*, 22(1), 152-166.
- Sakai, N. (1996). *Shizan sareru Nihongo/Nihon jin [Stillborn Japanese language and people: The historic-geopolitical location of "Japan"]*. Tokyo: Shinyo sha.
- Samuda, R.J. (1989). Multiculturalism: Perspectives and challenges, *Assessment and placement of minority students* (pp. 5-14). Toronto, Canada: C.J. Hogrefe.
- Schierup, C.-U. (1997). Multiculturalism and universalism in the United States and EU-Europe. In H.-R. Wicker (Ed.), *Rethinking nationalism and ethnicity: The struggle for meaning and order in*

- Europe* (pp. 111-126). Oxford, England & New York: Berg.
- Schlesinger, A.M. (1998). *The disuniting of America: Reflections on a multicultural society*. (Revised and Enlarged ed.). New York & London: W.W. Norton & Company.
- Sleeter, C. E., & Grant, C.A. (1987). An analysis of multicultural education in the United States. *Harvard Educational Review*, 57(4), 421-444.
- Suzuki, B.H. (1984). Curriculum transformation for multicultural education. *Education and Urban Society*, 16(3), 294-322.
- Taylor, C. (1991). *The malaise of modernity*. Concord, Canada: House of Anansi Press Limited.
- Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (pp. 25-73). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Teson, F.R. (1992). International human rights and cultural relativism. In R.P. Claude & B.H. Weston (Eds.), *Human rights in the world community: Issues & action* (pp. 42-51). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Troyna, B. (1987). Beyond multiculturalism: towards the enactment of anti-racist education in policy, provision and pedagogy. *Oxford Review of Education*, 13(3), 307-320.
- Vertovec, S. (1996). Multiculturalism, culturalism and public incorporation. *Ethnic and Racial Studies*, 19(1), 49-69.
- Walker, B. (1997). Plural cultures, contested territories: A critique of Kymlicka. *Canadian Journal of Political Science*, 30(2), 213-234.
- Walzer, M. (1995). Comment. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (pp. 99-103). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Watkins, W.H. (1994). Multicultural education: Toward a historical and political inquiry. *Educational Theory*, 44(1), 99-117.
- Wax, M.L. (1993). How culture misdirects multiculturalism. *Anthropology & Education Quarterly*, 24(2), 99-115.
- Yamauchi, M. (1996). *Minzoku mondai nyumon [Introduction to Ethnic Problems]*. Tokyo: Chuokoron Sha.
- Young, L.M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Young, J.C. (1984). Education in multicultural society: What sort of education? What sort of society? In J.R. Mallea & J.C. Young (Eds.), *Cultural diversity and Canadian education: Issues and innovations* (pp. 412-430). Ottawa, Canada: Carleton University Press.